

SEJARAH POLITIK ISLAM

*Muh. Zubri**

Pendahuluan

Adalah cukup alasan orang menengarai bahwa perkembangan Islam sejak sejarah kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil di pentas politik semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun 1 H bertepatan dengan tahun 622 M. Hanya dalam waktu sebelas tahun —Rasulullah wafat tahun 11 H.— kekuasaan pemerintahan beliau meliputi semenanjung Arabia. Kemudian memasuki abad 8 dan 9 M wilayah itu membentang dari Maroko —bahkan menyeberang ke Spanyol— ke timur, hingga India.

Pada sisi lain, atas dasar ayat Alquran “Tiada Aku lewatkan di dalam Al-Kitab ini sesuatu pun,” ditambah “Saya tidak mengutusmu kecuali mendatangkan kesejahteraan bagi alam semesta” maka segera disimpulkan bahwa ajaran Islam itu lengkap meliputi berbagai dimensi kehidupan. Menata kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan kehidupan dalam

dimensi lain, orang Islam merasa optimis sebab diyakini, pedomannya sudah ada. Tetapi optimisme saja tampaknya tidak cukup. Fakta empiri menunjukkan, perilaku politik antara masyarakat Islam dalam sebuah kurun waktu berbeda dari masyarakat Islam kurun waktu yang lain. Perbedaan komunitas muslim pun juga melahirkan perbedaan perilaku politik yang sering kali saling berbenturan. Begitu juga dalam dimensi kehidupan lain, seperti perilaku ritual, ekonomi, budaya selalu ada perbedaan. Dan pelajaran fikih dan akidah dipadati dengan perbedaan pikiran dan perilaku. Itu sebabnya ada yang mencoba berkata, ajaran Islam itu belum tuntas betul. Yang dimaksud dengan “ajaran Islam sudah lengkap” menjadi tidak jelas kecuali dipahami “lengkap dalam bentuk prinsip-prinsip dan bersifat global.”

*Dr. M. Zuhri, staf pengajar Program Studi Magister Islam, UMY.

Dalam wacana politik ada persoalan, apakah kerasulan Muhammad saw. mengandung misi politik? apakah agama Islam terkait erat dengan persoalan politik, kenegaraan dan pemerintahan? Apakah sistem dan bentuk pemerintahan dan prinsip-prinsipnya dibicarakan dalam Islam? Bagaimana pula aktivitas politik pasca era Rasulullah? Munculnya permasalahan semacam ini terkait dengan:

1. Umat Islam meyakini bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah agama yang lengkap, mengurus semua aspek kehidupan, ritual, sosial ekonomi, politik, dan sebagainya.¹
2. Bahwa tugas Muhammad saw. hanya membawa risalah keagamaan. Ini memberi kesan bahwa Islam membatasi diri pada persoalan agama saja. Tetapi jelas, Islam menghendaki terwujudnya keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.
3. Banyak rasul sebelumnya yang tidak mempunyai misi dan aktifitas politik. Dalam hal kekuasaan, pengikut para rasul dipersilahkan tunduk pada penguasa.²

Jawaban atas pertanyaan tentang hubungan antara Islam dengan politik (kekuasaan kenegaraan) dapat dikelompokkan menjadi 3.

Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Islam bukan agama dalam paham Barat, yang hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan saja. Sebaliknya, Islam adalah agama yang lengkap. Di dalamnya terdapat sistem kenegaraan. Orang Is-

lam tidak perlu merujuk ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw dan Khulafa al-Rasyidun. Pendukung kelompok ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, al-Maududi.

Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa Islam itu agama sebagaimana dipahami masyarakat Barat. Nabi Muhammad hanya seorang rasul sebagaimana para rasul sebelumnya, tidak otomatis memegang kekuasaan politik. Tugas seorang rasul yang begitu mulia, mengajak manusia di atas rel yang benar dan budi pekerti yang luhur, tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Pendukung kelompok ini antara lain Ali Abdu al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Ketiga, kelompok yang menolak bahwa Islam itu lengkap seperti pendapat pertama, tetapi juga menolak bahwa Islam itu seperti yang dipahami masyarakat Barat. Kelompok ini berpandangan bahwa di dalam Islam tidak ada sistem politik/kenegaraan, tetapi terdapat prinsip-prinsip dan nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pendukung kelompok ini antara lain Dr. M. Husein Haikal.³ Agaknya Fazlur Rahman termasuk juga dalam kelompok ini.⁴ Ia bukan saja berbicara tentang kemungkinan risalah Nabi mengandung ajaran politik, tetapi menerjemahkan konsep politik Nabi ke era modern.

Tidak begitu lama sepeninggal Rasulullah, di kalangan umat Islam terjadi konflik ditandai dengan wafatnya Usman

ibn Affan, dilanjutkan dengan pertikaian politik di masa Ali ibn Abi Thalib, terutama ketika akhirnya kekuasaan berpindah ke Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, pendiri dinasti Bani Umayyah. Setiap kali pergantian dinasti terjadi pertumpahan darah, bahkan, terkadang pertumpahan darah terjadi ketika pergantian kekuasaan dalam satu dinasti. Tulisan ini akan mencoba menguak seberapa jauh keteladan dan ajaran Rasulullah bersinggungan dengan wacana politik, serta aktivitas politik pada masa Khulafa al-Rasyidun dan sesudahnya secara sekilas. Penuturan sejarah dalam tulisan ini tidak menggunakan topik-topik periode para penguasa kronologis, tetapi tema-tema wacana politik, seperti, pengangkatan kepala negara, bentuk pemerintahan, konstitusi, dan sebagainya.

Pengangkatan Kepala Negara

Ali Abdur Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanya seorang Rasul seperti rasul-rasul lain, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepadanya.⁵ Tetapi tidak diragukan bahwa Nabi dalam kariernya mengemban risalah, berada dalam percaturan politik. Misalnya, mengadakan kontak dengan negara kerajaan lain, mempersiapkan pasukan perang, memberlakukan peraturan untuk kerukunan orang banyak, dan lain-lain, kendati bersifat sederhana bila diukur denganacamata sekarang. Kariernya dimulai dari proses perpindahan dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian berganti nama Madinah. Masyarakat Yatsrib yang

sekian lama berada dalam konflik berkepanjangan antar etnis dan perbedaan agama —suku Aus, Khazraj dan Yahudi dengan segala klennya— dan tidak menghasilkan seorang pemimpin, merasa kelelahan. Sekelompok orang Yatsrib dari Aus dan Khazraj menyatakan masuk Islam menemui beliau di Makkah pada tahun 621 M. Mereka berjanji tidak menyembah selain Allah dan meninggalkan perbuatan jahat serta akan mentaati Rasulullah saw. Peristiwa ini disebut *Bai'at Aqabah* pertama. Sosok pribadi Muhammad saw. menarik perhatian mereka untuk dijadikan tumpuan sebagai pemimpin. Pada tahun 622 M terjadi *bai'at* yang ke dua. Isinya, mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka dan akan mentaati beliau sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, Nabi berjanji akan berjuang bersama mereka, baik dalam perang maupun damai.⁶

Tidak terdapat satu ayat Alquran pun yang menyebut apalagi memerintah Nabi menjadi seorang kepala negara. Dengan demikian keberadaan Nabi sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai kepala negara melalui proses penunjukan dan kesepakatan orang banyak. Seolah ketika itu ada penyerahan kekuasaan diri dari peserta *bai'at* kepada Nabi yang diakui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik proses ini disebut “kontrak sosial.”⁷ Agaknya Alquran bukan melepas tangan begitu saja terhadap urusan negara dan politik. Setidaknya, bila masyarakat berada dalam sebuah negara mempunyai kewajiban patuh kepada penguasa (*ulul amri*).

Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah wafat adalah siapa yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat atau kepala negara. Apakah dengan cara pemilihan langsung atau melalui perwakilan atau bagaimana, di masa hayatnya beliau tidak menyebut ini, dan tidak ada satu ayat Alquran pun berbicara tentang suksesi ini. Setelah melalui perdebatan sengit antara kaum Anshar dengan kaum Muhajir, nyaris terjadi perpecahan umat, akhirnya dapat diperoleh kesepakatan, Abu Bakar menggantikan Rasulullah, dengan sebutan *Khalifah*.⁸ Pengangkatan Abu Bakar sebagai kepala negara ini bukan karena ia mempunyai hubungan famili dengan Nabi atau mertua, tetapi karena potensi pribadinya yang dilambangkan dengan penunjukan Nabi kepadanya untuk menggantikan imam dalam shalat ketika Nabi sakit. Berbeda dengan ini adalah proses pengangkatan Umar bin al-Khatthab menggantikan Abu Bakar. Beberapa saat sebelum meninggal, Abu Bakar mencoba mencari tahu secara diam-diam, siapa yang pantas menggantikannya. Ia tidak mau meninggalkan rakyat terperangkap dalam konflik karena suksesi.⁹ Akhirnya ia memutuskan berwasiat kepada umat agar sepeninggalnya kelak, Umar bin al-Khatthab lah yang *dibai'at* menggantikannya. Dengan cara ini, semacam pengangkatan putera mahkota, masyarakat tidak perlu bingung mencari pengganti khalifah, seperti yang terjadi ketika Rasulullah wafat. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan lugas tetapi dekat dengan masyarakat.

Lain lagi kebijakan yang diambil oleh Umar menjelang wafatnya. Ia tidak mengangkat “putra mahkota” tetapi dalam wasiatnya ia menunjuk 6 orang tokoh untuk menetapkan khalifah yang menggantikannya. Boleh jadi, sekarang disebut mengangkat formatur. Satu di antara 6 orang adalah Abdullah ibn Umar yang menurut Umar, tokoh ini boleh bersuara tetapi tidak boleh dipilih. Ia tidak mau nepotisme. Akhirnya Usman bin Affan terpilih dan *dibai'at* sebagai khalifah. Kalau Umar terkenal anti nepotisme, ditunjukkan dengan pesannya menjelang ia wafat agar Abdullah anaknya tidak diangkat menjadi penggantinya, maka Usman menghidupkan nepotisme dengan mengangkat para pejabat daerah dari keluarganya. Pergantian Usman ke Ali bin Abu Thalib disebabkan oleh karena Usman terbunuh oleh pemberontak dari kalangan umat Islam. Terpilihnya Ali ini atas desakan mayoritas masyarakat Islam di Madinah dan sekitarnya agar tidak ada kekosongan kekhalifahan. Pengangkatan ini tidak melalui proses pertemuan seluruh sahabat senior karena di samping waktunya mendesak, mereka berada di wilayah yang jauh dari Madinah, pusat pemerintahan.

Empat orang khalifah ini dalam sejarah disebut *al-Khulafa al-Rasyidun*. Pengangkatan empat khalifah tersebut terjadi dengan cara yang berlainan satu dengan yang lain, dan tidak menggunakan cara suksesi yang mentradisi di kerajaan. Abu Bakar diangkat dengan “pemungutan suara,” Umar dengan “pengangkatan putera mahkota,” Usman dengan formatur, dan Ali dengan “pemungutan suara” lagi.

Philip K. Hitti menilai pemerintahan keempat tokoh ini sebagai periode pemerintahan Republik.¹⁰

Terbunuhnya Usman berbuntut panjang. Karena Ali tidak dapat mengusut pelakunya maka keluarga Usman memberontak. Ali menjadi korban pembunuhan oleh kelompok yang tadinya setia kepadanya (kaum Khawarij) karena Ali tidak dapat menumpas pemberontak dari keluarga Usman di bawah pimpinan Mu'awiyah. Setelah itu kekhalifahan dipegang oleh keluarga Umayyah secara turun temurun hingga runtuhnya pada tahun 750 M. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan ibukota negara di Damaskus. Kekhalifahan berpindah ke tangan keluarga Abbasiyah dengan ibukotanya Bagdad mulai tahun 750 sampai dengan 1258 M.

Kemudian setelah Bagdad jatuh, memasuki abad 14, melalui proses panjang pemerintahan Islam berpindah ke Turki hingga awal abad 20. Di tengah-tengah membesarnya Turki terdapat kerajaan besar Islam lainnya, di Mughal India dan kerajaan Safawi di Persia. Dengan format kerajaan ini maka sistem suksesi adalah seperti yang terjadi di kerajaan pada umumnya, tidak seperti yang terjadi di masa Khulafa al-Rasyidun. Selama berlangsung budaya kerajaan, tidak ada pikiran pembatasan periode jabatan. Bila ada yang tidak sabar maka pergantian kekuasaan melalui perang saudara.

Pada abad 19, ketika pengaruh Barat terhadap sistem pemerintahan di Turki Usmani semakin kuat, dunia politik Islam mulai diwarnai ketegangan. Pikiran

menyelenggarakan pemerintahan negara nasional mulai tersosialisasikan di pemerintahan Usmani, ditandai dengan lahirnya *Tanzimat* dan konstitusi di bawah kepeloporan kelompok Usmani Muda. Pemikiran semacam itu terasa ganjil bagi dunia Islam karena selama ini kekuasaan itu hanya dipilah menjadi *darul Islam* dan *darul harb*. Pemilahan wilayah kekuasaan tersebut didasarkan hubungan keagamaan, bukan hubungan kebangsaan, sehingga yang dimaksud *daul Islam* adalah satu kekuasaan politik. Setelah Perang Dunia I & II dunia Islam menemukan iklim lain. Masyarakat Islam mendirikan negara-negara nasional, negara yang didasarkan kebangsaan dan teritorial. Ada yang mengambil bentuk kerajaan dan ada yang republik. Corak negara dan pemerintahan setelah era demokrasi—semenjak Revolusi Perancis—berdampak kepada kesadaran baru di dunia Islam, bahwa loyalitas tidak harus kepada khalifah—yang cakupan wilayah spiritualnya seantero dunia—tetapi kepada negara dan pemerintahan kebangsaan yang teritorialnya lebih konkret. Karena kesadaran ini menimbulkan dampak lain, terjadinya perpecahan, setidaknya kekurangpedulian sesama muslim karena perbedaan kesukuan dan kebangsaan, maka muncul ide mengembalikan kekhalifahan agar dapat mengikat dunia Islam kendati format negara nasional tetap berjalan.

Untuk suksesi ada yang mengganjal. Kalau kita merujuk norma agama, tidak seharusnya suksesi dilakukan melalui pertumpahan darah sesama muslim, tetapi melalui musyawarah. Tetapi sering terjadi

pergantian penguasa melalui perang saudara. Para ulama juga tidak mempersoalkan, apakah cara itu dibenarkan oleh agama. Sebab, bila jawabnya “tidak dibenarkan” akan berakibat dinasti yang umumnya berabad-abad dianggap tidak sah. Ini agaknya dirasa tidak menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu ulama memulai pembicaraan dari realitas sebuah pemerintahan.

Isu penting yang muncul belakangan ini di Indonesia dan menimbulkan ketegangan dalam percaturan politik Islam adalah munculnya perjuangan mengangkat Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden RI. Adu dalil antara pihak yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dengan yang melarang pun berlangsung sengit, bahkan masing-masing pihak menuduh pihak lain mempunyai kepentingan politik dalam mengeluarkan fatwanya. Kalau kembali ke pengalaman kekuasaan politik umat Islam, tidak dijumpai khalifah atau sultan perempuan. Ini dijadikan dalil empiri bahwa wanita tidak pernah menjadi kepala negara. Apalagi ada hadis yang menyebutkan bahwa akan celaka masyarakat yang menyerahkan “kewilayahan” kepada seorang wanita, semakin menguatkan pendapat tadi. Dengan demikian tidak terlintas dalam pikiran ulama dulu akan kemungkinan wanita menjadi kepala negara. Karenanya Ibn Abi Rabi’, seorang pemikir *Siyasah Islamiyah* tertua, mensyaratkan, kepala negara harus memiliki sifat “kebakapan”.¹¹ Tetapi larangan tekstual kepemimpinan

negara di tangan wanita tidak ada. Jangankan itu, perintah memimpin negara —buat pria maupun wanita— juga tidak ada, apalagi larangannya.

Tidak kalah menarik dari yang baru dibicarakan adalah penyelenggaraan pemilihan umum dalam masyarakat Islam di berbagai negara. Konsekwensi pemilu adalah pembentukan partai. Dalam sejarah politik Islam dahulu, pembentukan partai tidak dikenal. Tetapi kelompok masyarakat tertentu dalam sebuah negara memang ada. Di masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib ada kelompok yang berpihak ke Aisyah dan Abdullah ibn Zubeir, di Syam ada kelompok Mu’awiyah. Setiap kelompok ingin memegang kekuasaan dan menjatuhkan pihak yang sedang berkuasa. Kalau kita melihat yang terjadi di Indonesia, sikap partai-partai yang ada di Indonesia sekarang —menurut undang-undang kepartaian— tidak sekeras itu. Boleh jadi orang sekarang lebih dewasa dari orang dulu. Yang mengganggu pikiran orang Islam sekarang adalah, apakah mendirikan partai yang tidak berasaskan agama dibenarkan. Pertanyaan semacam ini tentu berdasar asumsi bahwa orang Islam hanya mendirikan negara Islam; dengan kerangka pikir pembagian wilayah ke dalam *darul Islam* dan *darul harb*. Pertanyaan semacam ini melantur sampai dengan pengangkatan wakil rakyat yang non Islam, dan akhirnya menggugat mendirikan negara yang tidak didasarkan agama, tetapi nasionalisme. Itulah yang berkembang dalam sejarah politik Islam.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam pemerintahan atau kekuasaan politik terdapat tugas-tugas pelayanan dan pengaturan publik, seperti, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum, penetapan perundang-undangan, serta penghimpunan dana. Masing-masing tugas ditangani oleh lembaga tersendiri. Kalau kita melihat yang terjadi di masa Rasulullah, pemerintahan beliau sangat sederhana; tidak ada pemilahan atau pembagian kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam lembaga judikatif, eksekutif, legislatif, dewan pertimbangan, dan lembaga pemeriksaan keuangan. Nabi adalah penguasa tunggal, memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif sekaligus. Bahkan, beliau juga tidak mengangkat menteri untuk kabinet kekuasaannya. Waktu itu partai-partai juga tidak ada. Belum musimnya. Hanya, Nabi mempunyai beberapa sahabat dekat yang terpercaya untuk diminta bantuan, seperti, pertimbangan mempersiapkan pasukan dan penulisan dokumen dan surat-surat. Untuk daerah yang jauh seperti Yaman, Nabi pernah mengangkat seorang administrator, yang untuk sekarang setara dengan gubernur. Pejabat ini tidak saja melaksanakan tugas eksekutif, tetapi juga judikatif. Tidak mustahil bila dalam sudut pandang ini pemerintahan beliau disetarakan dengan monarki.

Pada waktu itu tidak ada pikiran dalam masyarakat kecuali bahwa kepala negara adalah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Nabi sebagai kepala negara disetarakan dengan

raja, agaknya tidak perlu dipermasalahkan. Andaikata beliau tidak pernah mengajak musyawarah dalam mengambil kebijakan pun tidak menyalahi tradisi dalam bermegara. Artinya, belum masanya rakyat merasa berhak untuk diajak berembug membangun bangsa dan negara.

Peraturan yang diterbitkan oleh Nabi tidak berdasarkan hasil sidang-sidang, tetapi diwarnai oleh wahyu Ilahi. Tentu, ini sejalan dengan misi beliau sebagai pemandu umat manusia di jalan yang lurus dengan segala keteladanannya. Bila faham demokrasi — kekuasaan di tangan rakyat — dijadikan idola penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, maka penyelenggaraan pemerintahan Nabi tidak memakai sistem atau paham ini. Celakanya, pikiran ideal formal tentang negara dan pemerintahan abad modern dijadikan kacamata untuk melihat sistem kenegaraan Rasulullah saw. Kesimpulannya, Rasulullah seorang diktator absolut dan tiran. Apakah secara empiri beliau terbukti sebagai seorang tiran dan diktator, tidak diurai secara mendalam. Bukankah sistem ketatanegaraan demokrasi sekedar sarana mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, bukan satu-satunya? Bila ini tujuan bernegara, maka “negara wahyu” merupakan negara istimewa, yang jauh dari cacat seperti yang dituduhkan.

Aturan yang diterima melalui wahyu diterapkan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Dengan kata lain, aturan bermasyarakat diwarnai oleh wahyu. Tetapi benar bahwa untuk menghadapi berbagai persoalan, Islam menyuruh bermusyawarah. Kalau sesekali beliau

bermusyawarah dalam mengambil kebijakan, karena persoalan tersebut terlalu kecil untuk diwahyukan, sehingga dipercayakan pada hasil musyawarah. Keteladanan musyawarah ini kelak menjadi penting di saat wahyu tidak turun lagi. Ada beberapa contoh musyawarah dilakukan Nabi dalam mengambil kebijakan ketika wahyu tidak perlu turun.

Demokrasi menurut bahasa artinya kekuasaan di tangan orang banyak. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berpijak pada hasil kesepakatan orang banyak, bukan satu atau dua orang, melalui mekanisme tertentu. Dalam iklim demokrasi, setiap orang diperbolehkan mengemukakan pendapat. Bila terjadi perbenturan pendapat yang tidak bisa dikompromikan, kelompok yang mendapat suara terbanyak memenangkan “pertandingan”. Tolok ukur kebenaran adalah pendapat yang menang. Musyawarah yang diajarkan Rasulullah adalah lembaga untuk menghimpun berbagai pendapat untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilaksanakan dalam rangka mematuhi ajaran Allah dan RasulNya. Bila terjadi pertengkaran, peserta musyawarah mengacu kepada ajaran wahyu, sebagai tolok ukur kebenaran. Dengan demikian, diskusi yang berkembang dalam musyawarah terikat oleh etika agama, seperti, menghormati pihak lain dan menjaga keutuhan umat.

Demokrasi itu sendiri sebenarnya sebuah ide anti absolutisme yang ditampilkan oleh para raja. Artinya, demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dengan batas, tidak mengganggu hak orang lain.

Karena demokrasi itu anti pemaksaan pendapat, sikap dan pendirian, maka berbagai pendapat yang berbeda dapat diselesaikan dengan jalan kompromi. Bila tidak, demokrasi tinggal sebuah kulit yang membungkus absolutisme. Titik kesamaan antara demokrasi dengan musyawarah adalah penghargaan terhadap pendapat orang lain.

Tampaknya telah menjadi keyakinan pada waktu itu bahwa di dunia Islam hanya ada satu pusat kekuasaan politik. Untuk mendirikan kerajaan Abbasiyah harus menumbangkan kerajaan Umayyah. Tidak boleh ada pusat kekuasaan politik lebih dari satu seperti yang terjadi di zaman modern. Di era Abbasiyyah ini, berdiri beberapa “kerajaan kecil” disebut kesultanan yang tunduk kepada khalifah Abbasiyyah. Artinya, pengakuan akan khilafah —kekuasaan politik tingkat pusat— merupakan doktrin penting dalam melegitimasi semua kegiatan sosial politik. Khilafah menjadi simbol yang mengandung kekudusan.

Gelar kepala negara di masa Mu'awiyah tetap *khalifah*, begitu juga di masa Abbasiyah. Agar kekuasaan mendapat dukungan yang mendalam, para khalifah Abbasiyah menempatkan diri mereka sebagai *zhillullah fil 'ardh* (bayangan Allah di bumi).¹² Abu Ja'far al-Mansur menyatakan, “Sesungguhnya saya adalah sulthan Allah di bumiNya.”¹³ Ini mengandung arti bahwa khalifah memperoleh kekuasaan dan kedaulatan dari Allah, bukan dari rakyat. Karena khalifah menganggap kekuasaannya diperoleh atas kehendak Allah maka kekuasaannya

bersifat absolut, sebab kekuasaannya dianggap sebagai penjelmaan kekuasaan Tuhan sebagai Penguasa tunggal alam semesta.

Lembaga pemerintahan pada masa para penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyyah tidak ada perbedaan mencolok dengan sebelumnya. Hanya, di sana-sini ada penambahan lembaga publik seperti, lembaga yang mengurus pelanggaran perilaku ekonomi di pasar, pengadilan keluarga penguasa. Pasang-surut pemerintahan disetiap dinasti itu selalu ada. Begitu juga dengan tampilan penguasanya. Seperti di negara lain ada lembaga-lembaga pemerintahan, di pemerintahan dinasti Arab Abbasiyah pun ada *wazir* (Perdana Menteri), *hajib* (Kepala Rumah Tangga Istana), *Amir al-Umara* (Panglima tentara pengawal). Ada kalanya *wazir* mempunyai kekuasaan penuh ketika seorang Khalifah kurang mementingkan soal pemerintahan. Dalam keadaan seperti ini *wazir* berbuat semau-mau sendiri dalam mengangkat dan mengganti gubernur-gubernur di daerah, seperti yang dilakukan oleh para *wazir* keturunan Barmak di zaman Abbasiyyah. Sekali waktu, *Hajib* yang kuat dapat mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari *wazir*. Begitu juga Kepala Panglima Pengawal yang berasal dari Turki pernah sekehendak hatinya menguasai pemerintahan Abbasiyyah di awal abad 10.¹⁴

Kepala Negara dari era Nabi sampai dengan Khulafa al-Rasyidun adalah pemimpin agama sekaligus. Pada diri kepala negara terdapat kekuasaan temporal dan kekuasaan spiritual. Memasuki

era dinasti-dinasti hingga abad 20, seorang kepala negara (khalifah atau gelar lain) bukan pemimpin agama. Artinya, kemampuannya hanya mengurus umat dalam dimensi politik (temporal), bukan kehidupan beragama (spiritual). Sementara, image umat adalah, urusan agama dan politik tidak dapat dipisahkan secara tegas. Untuk mengatasi ini setiap kepala negara mengangkat seorang atau beberapa ulama sebagai pendamping untuk menjawab tantangan berbagai ihwal keagamaan, disebut *Syaikhul Islam*.¹⁵

Menyinggung lembaga kenegaraan, dalam pemikiran politik Islam seperti, al-Mawardi, al-Nawawi, al-Razi, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain-lain, terdapat konsep tentang lembaga perwakilan rakyat, disebut *Ahlul Halli wal 'aqdi*. Arti harfiahnya, lembaga yang mempunyai otoritas mengurai (*a-halli*) dan mengikat (*al-'aqd*). Fungsinya mengangkat dan memberhentikan kepala negara. Pengangkatan *khulafaur rasyidun* tempo dulu, menurut pemikiran ini dilakukan oleh lembaga tersebut, kendati ketika itu nama *ahlul halli wal 'aqdi* belum ada. Tetapi tampaknya konsep itu tidak membumi. Karena dalam kenyataan, pengangkatan kepala negara berdasarkan keturunan raja atau berdasarkan hubungan kekeluargaan. Konsep tentang *Ahlul Halli wal 'aqdi* yang cukup lama ini tampaknya disebabkan oleh tingkah penguasa yang menyimpang jauh dari rambu-rambu agama serta mengabaikan kepentingan rakyat. Konsep tersebut baru terlaksana setelah masyarakat Islam membangun negara nasional dengan sistem demokrasi.

Mengingat tuanya ide tentang lembaga tersebut (antara abad 11 H), boleh jadi paham demokrasi yang dipopulerkan setelah Revolusi Perancis diilhami oleh pemikiran para ulama. Setidaknya, pemikiran demokratis ulama *siyasah* jauh lebih dulu muncul dari pemikiran demokrasi tersebut.

“Apakah orang Islam harus mendirikan negara Islam dan menyelenggarakan pemerintahan Islam?” adalah sebuah pertanyaan yang hingga kini masih tetap hangat. Sebab, sekarang terdapat beberapa negara yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam; ada yang berlabel Islam ada yang nasional. Kalau kita kembali ke permulaan Islam, negara dan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi tidak terdapat label Islam, tidak disebut negara Islam, tetapi diwarnai oleh ajaran Islam. Seolah-olah dikatakan, itulah format Islami dalam menyelenggarakan pemerintahan bagi masyarakat majemuk. Format ini dilanjutkan oleh *Khulafaur Rasyidun*. Setelah berpindah ke pemerintahan berikutnya, negara berubah menjadi kerajaan kendati gelar kepala negaranya tetap *khalifah*. Negeranya tidak diberi label Islam tetapi label keluarga, *Bani Umayyah*. Begitu juga dengan pemerintahan periode berikutnya, diberi label keluarga, seperti Abbasiyyah, Usmani, Syafawi, Mughal. Dinasti kecil-kecil di bawah kekuasaan Abbasiyyah pun menggunakan label keluarga, seperti, Ghaznawi, Fathimi, Idrisi, dan sebagainya. Islam sebagai label negara tampaknya digunakan setelah komunitas Islam mendirikan negara nasional, seperti Republik Islam Mesir, Pakistan, Islam

Irak, Iran. Negara Arab, di mana Masjid Nabawi dan Masjid al-Haram berada, tidak diberi label Islam, tetapi keluarga Ibn Su’ud. Agaknya Islam sebagai label negara tidak begitu penting sepanjang sejarah politik Islam. Yang penting bagaimana ajaran Islam mewarnai penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pihak yang menganggap label penting berkata, “diberi label Islam saja perilaku orangnya tidak benar, apalagi tidak diberi label.”

Konstitusi

Konstitusi itu menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejarahwan pada umumnya menyatakan bahwa Piagam Madinah yang diberlakukan pada pemerintahan Rasulullah merupakan konstitusi modern tertua sepanjang sejarah. Dalam kariernya sebagai pemimpin umat, Nabi menghadapi masyarakat majemuk, baik dalam agama maupun etnis. Agar hubungan berbagai kelompok berlangsung harmonis, di dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa setiap warga Madinah mempunyai kewajiban mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Sementara, setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Tolong-menolong dan kekompakan harus dijaga oleh setiap kelompok masyarakat.

Bila dipahami bahwa sebuah konstitusi itu berfungsi mengatur perilaku yang melibatkan orang banyak, tampaknya Alquran dirasakan sebagai konstitusi oleh para sahabat Nabi, karena Alquran

berbicara tentang itu dalam bentuk global yang harus dipatuhi oleh mereka, bahkan oleh Nabi sekalipun. Dalam melaksanakan ajaran Alquran, bila orang mampu dari kalangan Islam ditarik zakat, maka non Islam ditarik *jizyah* yang ukurannya setara dengan zakat. Oleh karenanya Kerajaan Arab Saudi sekarang tidak memerlukan konstitusi seperti yang dimiliki oleh hampir setiap negara dewasa ini, cukup dengan Alquran, hadis Nabi dan pendapat Mazhab.

Kalau di masa Nabi “posisi” non muslim masih cukup kuat di negara Madinah, pada masa Khalifah-khalifah sesudahnya -khulafaur rasyidun, khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas- posisi mereka semakin tidak kelihatan, sehingga pemerintahan dengan nuansa religius yang dipimpin para khalifah tersebut semakin mengental. Dengan sendirinya pedoman bernegara adalah Alquran dan keteladanan Nabi. Di sisi lain, tradisi kerajaan yang menempatkan raja sebagai pengatur rakyat dan tidak pernah terkena aturan tetap berlaku secara umum. Tidak semua penguasa itu memiliki sifat dan perilaku ideal. Kekuasaan tanpa batasnya sering kali disalahgunakan. Maka tidak mustahil bila di masa dinasti Abbasiyah Ibnul Muqaffa’ mengusulkan *taqnin* dengan maksud mendudukkan hak dan kewajiban warga negara, termasuk raja. Agaknya *taqnin* hampir sama dengan konstitusi. Namun, belum sampai sumpama menuangkan gagasan itu ia terburu wafat. Minat memiliki konstitusi pernah juga dikemukakan oleh penguasa Abbasiyyah agar Imam Malik tidak keberatan

Muwattha’nya dijadikan pedoman bermasyarakat, seperti undang-undang atau konstitusi di negerinya. Tetapi Imam Malik tidak berkeberatan karena pertimbangan tertentu.

Semangat menciptakan konstitusi di kalangan umat Islam timbul-tenggelam. Pada akhir masa pemerintahan Turki Usmani ide itu muncul kembali, diprakarsai oleh kelompok Usmani Muda. Kekuasaan Sultan yang tak terbatas perlu dibatasi oleh konstitusi seperti yang terjadi di Barat tempat mereka belajar ilmu politik. Ide mewujudkan konstitusi berhasil, tetapi misinya gagal karena isi konstitusi tidak dapat membatasi kekuasaan Sultan, justru memperkuat posisinya.¹⁶ Setelah masyarakat Islam mendirikan negara atas dasar nasionalisme, bukan atas dasar ikatan agama, hampir setiap negara memiliki konstitusi karena dipengaruhi oleh paham demokrasi yang berkembang setelah Revolusi Perancis.

Terlepas dari itu semua, pemerintahan Islam, terlebih yang menghimpun masyarakat majemuk perlu konstitusi. Kalaupun diyakini Alquran dan keteladanan Nabi mengandung ajaran bernegara, konstitusi diambil dari sana.

Ekspansi, Dakwah dan Perang

Sejarah menuturkan bahwa wilayah kekuasaan Islam dari lahirnya terus-menerus meluas. Yang tadinya hanya di semenanjung Arabia akhirnya dalam kurun waktu tertentu wilayah itu terbentang di barat sampai Maroko bahkan Andalus, di timur sampai India, sebagai

disebut di muka. Ini tidak mustahil membentuk image, betapa dahsyat perang yang menyertai ekspansi itu. Jangankan pada kurun waktu itu —antara abad 8 sampai dengan 16— ekspansi bangsa Eropa di abad 17, 18 sampai dengan Perang Dunia II pun diwarnai oleh peperangan. Kehancuran Bagdad oleh serangan bangsa Mongol pada pertengahan abad 13 berkaitan dengan ekspansi mereka. Sebelum Islam lahir, perang antara Romawi dengan Persia yang berkepanjangan juga tidak lepas dari kepentingan ekspansi. Dalam konteks sejarah, tampaknya ekspansi dan perang bukan hal yang tabu. Ia menjadi tabu setelah deklarasi HAM.

Normatif, Islam membawa misi dakwah. Dalam dakwah tidak boleh ada pemaksaan obyek dakwah untuk harus beragama Islam. Islam melalui dakwahnya menunjukkan akidah yang benar dari yang salah dengan argumen-argumen rasional sebagai disebut dalam banyak ayat Alquran. Dalam kehidupan sosial, norma-norma Islam —seperti adil, santun, tidak curang, tidak zalim dan sebagainya— harus diterapkan dalam kehidupan sosial. Waktu itu negara dipegang oleh raja yang dekat dengan arogansi dan kezaliman. Pemerintahan semacam itu membebani rakyat yang memang sudah melarat. Sebuah hadis yang dijadikan dasar adalah “Barang siapa melihat kemungkaran harus merubahnya dengan tangan atau lisan atau hati...”¹⁷ Penjarahan terhadap pemerintahan zalim mendapat dukungan rakyat setempat karena akan diganti dengan tata hidup sosial yang adil dan manusiawi, sehingga hal ini memperlancar

ekspansi. Di antara kezaliman tersebut adalah penarikan pajak yang sangat memberatkan rakyat. Karena tidak memaksakan beragama Islam maka bekas wilayah Islam, seperti, Spanyol dan India yang berabad-abad dikuasai Islam, setelah Islam meninggalkannya, mereka tetap memeluk agama lamanya. Sementara, Watt menilai bahwa motivasi ekspansi Islam dengan perangnya adalah dalam rangka penjarahan, bukan dalam rangka mengislamkan orang atau menyuruh orang bertaubat.¹⁸

Perang itu sebenarnya pintu darurat. Apalagi sesama orang Islam, pintu darurat pun tidak. Perang bersifat defensif. Kualitas penyerangan balik oleh orang Islam, paling tinggi, setara dengan kualitas serangan yang mereka terima. Boleh kurang, tidak boleh lebih.¹⁹ Kalau kita kembali ke kisah umat para rasul terdahulu, terlihat jelas, ada saja peperangan yang diperagakan oleh para rasul menghadapi penguasa yang zalim. Duduk persoalannya, para rasul datang ke masyarakat yang struktur sosial budaya dan religiousnya *bubrah*, dengan maksud memberi bimbingan agar mereka kembali membangun manusia seutuhnya dengan cara yang benar. Tetapi kedatangan para rasul ditanggapi dengan keangkuhan dan kesombongan. Sambil mencari tempat yang aman, para rasul dan pengikutnya mengadakan perlawanan seperlunya. Tentu, korban jiwa akibat peperangan tetap ada. Rasulullah saw. mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dari para rasul lainnya.

Kita juga melihat bahwa akhirnya Nabi memperluas wilayah Islam dengan ekspedisi-ekspedisi, dilanjutkan oleh para *khalifah* sesudahnya. Karenanya, tidak heran kalau Islam dinilai kontroversi dalam penyiaran Islam. Di satu sisi, Islam tidak mengajarkan penyiaran Islam dengan perang ekspansif, di sisi lain terlihat, meluasnya Islam beriring dengan peperangan. Untuk melihat ini, kita harus mencermati beberapa hal.

1. Islam memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kemunkaran yang dilakukan oleh siapa saja, tidak pandang beragama Islam atau tidak, harus diberantas dengan segala daya yang dimiliki. Waktu itu pemerintahan dipegang oleh "penguasa tunggal" raja-raja, yang sangat dekat dengan arogansi, otoriter, dan, singkatnya, zalim. Tak ayal lagi, pemerintahan semacam itu memberi beban rakyat yang memang sudah melarat, dan menyenangkan "penguasa tunggal" dan keluarganya. Agaknya, Islam melihat hal memprihatinkan ini. Karena itu, wujud *nahi munkarnya* menghentikan kezaliman tersebut, yang tiada lain dengan kekuatan militer bila perlu. Dan ternyata, rakyat lebih senang dengan pemerintahan Islam karena hanya dibebani *jizyah* dibanding pemerintahan lama yang beban pajaknya amat tinggi.
2. *Amar ma'ruf nahi munkar* ini kelihatannya tidak terkait langsung dengan penyiaran Islam karena dalam kenyataan, masyarakat asing obyek *nahi munkar* tidak harus masuk

Islam. Karena itu, W.M. Watt berkesimpulan bahwa perluasan Islam ke luar Arab dimaksudkan untuk menyuruh orang (daerah perluasan) bertaubat, tetapi sekedar mencari jarahan.²⁰ Karena Watt melihat demikian, maka sebenarnya ia mengakui bahwa **penyiaran** Islam bukan karena pedang. Sebab, perluasan wilayah Islam menurutnya bukan lagi atas nama penyiaran agama, tetapi atas nama rampasan perang. Orang daerah perluasan dibolehkan memilih agama apa saja yang mereka kehendaki. Agaknya pertimbangan *amar makruf nahi munkar* kurang diperhatikan oleh Watt. Sekiranya hal yang disebut terakhir itu menjadi perhatiannya, tentu ia akan berkesimpulan lain. Bahwa Islam tidak memaksa orang daerah perluasan memeluk agama Islam, dan peperangan yang terjadi justru menghentikan penindasan yang berkepanjangan dari penguasa zalim. Tentunya, yang paling berkorban para raja dan keluarganya.

Dari prinsip perang menurut penuturan tadi kita mengetahui bahwa perbedaan akidah tidak menjadi persoalan di dalam Islam. *Amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan di dalam Islam sebenarnya merupakan kebutuhan asasi umat manusia, baik individu maupun masyarakat. Itu pula yang sebenarnya diperjuangkan oleh setiap agama yang dibawa oleh para rasul. Bila diterima bahwa semua agama yang dibawa oleh setiap rasul itu "Islam", maka perjuangan

Islam adalah perjuangan yang dibutuhkan oleh semua umat beragama.

Bagi orang Islam perang adalah kegiatan yang menjanjikan. Mati karena perang membela kebenaran agama dijamin masuk surga, disebut mati syahid. Tidak ada kenikmatan dunia menyamai, apalagi melebihi kenikmatan surga. Karena itu mati syahid bukan hal yang menakutkan, sebaliknya, kebanggaan. Menang perang berarti perbaikan ekonomi karena mendapat imbalan rampasan perang. Karena itu berangkat perang memiliki motivasi tinggi. Sementara, pihak lawan tidak memiliki motivasi apa-apa, malahan dihantui rasa takut mati dan tidak tahu bagaimana nasibnya sesudah perang. Ada benarnya bila dikatakan bahwa perang berarti membuka lapangan pekerjaan. Ekspansi dengan ide *amar ma'ruf nahi munkar* mudah menarik minat dan perhatian, terutama masyarakat nomad. Tidak mustahil bila bagi pihak tertentu, perang dan ekspansi perlu dilestarikan. Dengan demikian analisis Watt tentang ekspansi dan perang dibenak orang Islam dapat dimengerti. Perlu ditambahkan di sini, mengapa ekspansi dilakukan. Sebelum Islam, bangsa Arab mempunyai kegemaran berperang. Setelah mereka masuk Islam berada dalam satu *ummat* yang tidak boleh bertengkar dengan sesamanya. Kata Harun Nasution, di sini bertemulah iman yang tebal dengan kegemaran berperang tadi untuk mengalahkan kekuatan di luar seperti Bizantium dan Persia.²¹

Kesimpulan

Benar bahwa Alquran tidak mengutus Muhammad Rasulullah untuk menjadi kepala negara, apalagi raja. Tetapi Nabi berada dalam suasana yang menuntut dirinya memimpin umat, dalam bentuk pemerintahan negara. Oleh karena itu Alquran menyebut secara garis besar hak dan kewajiban pihak rakyat dan pihak *ulul amri* bila masyarakat membentuk negara. Prinsip bernegara disebutkan dalam Alquran terkadang dalam bentuk kisah umat terdahulu, terkadang pula dalam bentuk dialog langsung. Begitu globalnya prinsip-prinsip bernegara dalam risalah beliau sehingga tidak ada pembicaraan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, pengangkatan kepala negara, dan sebagainya. Itu semua diserahkan kepada manusia untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan catatan, tidak menyimpang dari prinsip umum, seperti, keadilan, kerukunan, tolong menolong dalam kebaikan, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam sejarah politik Islam terjadilah perbedaan bentuk pemerintahan seperti masa khulafa al-rasyidun dengan sistem "demokrasi" dengan generasi sesudahnya dengan sistem monarki. Ketegangan dalam bernegara muncul manakala tradisi yang sudah mapan mulai bergeser, apalagi prinsip-prinsip di atas diabaikan.

Agaknya, negara di masa Nabi hingga akhir dinasti Umayyah dapat disebut negara kesatuan, sedangkan era dinasti Abbasiyah hingga akhir Usmaniyyah disebut negara serikat. Ketika wilayah

masyarakat Islam mulai terlepas dari cengkeraman penjajah Eropa, seperti Indonesia, Mesir, Malaysia, India, muncul prakarsa mendirikan negara nasional, bukan negara yang didasarkan ikatan Islam semata. Ini merupakan ketegangan baru karena sebelumnya tidak ada bayangan semacam itu dalam dunia politik Islam.

Pasang-surut pengamalan prinsip-prinsip berpolitik Islami mendorong para ulama untuk mengemukakan pendapat tentang berbagai hal, seperti pengangkatan kepala negara, pemilahan kekuasaan, bentuk pemerintahan.

Catatan:

¹Dalil yang dipakai adalah surah al-Maidah: 3 "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku sempurnakan pula nikmatKu untukmu. Aku telah lega kalian menjadikan Islam sebagai agamamu." Ayat lain dapat dirujuk, "tidak ada yang Aku lewatkan sesuatupun di dalam Alquran." (Surat al-An'am: 38). Dengan demikian, semua aspek kehidupan manusia sudah termuat di dalam Islam, termasuk aspek kehidupan berpolitik dan bernegara.

²Ali Abdur Raziq, *Kekhilafahan dan Dasar-dasar Kekuasaan*, dalam Islam dan Pembaharuan, Terj. Machmun Husein. Rajawali, Jakarta, 1995, h. 40.

³Munawir Sjadzali, Prof.Dr., *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*. UI-Press, Jakarta, 1992, h. 1-2.

⁴Fazlur Rahman, Prof.Dr., *Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistan Milleu*, *Islamic Studies* 6, 1967, h. 205-224.

⁵Ali Abdur Raziq, *loc. Cit.* Pendapat ini sejalan dengan pandangan sebagian kaum Khawarij bahwa kepala negara itu diperlukan hanya jika maslahat umat menghendaki. Pada hakekatnya umat tidak berhajat kepada Khalifah atau Imam untuk memimpin mereka. Menurut Harun Nasution, paham ini dekat dengan komunisme. Dalam paham ini negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984, Jilid 1, h. 97

⁶Ibn Hisyam, *Al-Sairah al-Nabawiyah*, Muassasah Ulum Alquran, Buku pertama, h. 422-423. Bandingkan dengan Ibn Ishaq, *Sairah Rasul Allah*, Terj. Alfred Guillaume. *The Life of Muhammad*. Oxford University Press, 1970, h. 198-205.

⁷Sabine. G.H., *A History of Political Thought*, Collier Books, New York, 1959, h. 398

⁸Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz IV, h. 38-41.

⁹Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqidah*, Dar al-Fikr, Beirut, h. 95.

¹⁰Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, The Macmillan Press Ltd, New York, 1974, h. 183. Ada beberapa paham tentang orang yang dapat diangkat menjadi kepala negara. Sebuah hadis populer "*Imam* itu harus orang Quraisy" dipraktekkan dalam waktu lama, semenjak pengangkatan Abu Bakar sampai pertengahan abad 13 ketika Abbasiyyah dihancurkan tentara Hulagu dari Mongolia. Kaum Khawarij tidak mengakui hadis itu, dan berpendapat, *khalifah* bisa dari suku mana saja asal orang terbaik. Kaum Syi'ah sebaliknya, berpendapat bahwa yang berhak memimpin negara hanya *Ahlul Bait*. Tegasnya keturunan Ali bin Abu Thalib. Kelompok yang disebut terakhir ini sangat kental dengan kemauan bentuk negara kerajaan dengan suksesi turun-temurun.

¹¹Muhammad Jalal Syaraf & Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, Dar al-Jami'ah al-Mishriyyah, Iskandariyah, 1978, h. 219.

¹²W.M. Watt, *Islamic Political Thought*, Edinburgh, 1968, h. 34

¹³Muhammad Jalal Syaraf & Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *op. cit.*, h. 171.

¹⁴*Ibid.*, h. 318-323.

¹⁵Dalam tradisi Jawa yang dilambangkan dalam pewayangan, setiap raja selalu mempunyai pendamping spiritual, disebut pendeta.

¹⁶Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam. Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 111-113

¹⁷Hadis riwayat Muslim dalam Kitab al-Iman no. 70, A-Tirmizi dalam Kitab al-Fitan no. 2098, Abu Daud dalam Kitab as-Shalat no. 963, Ibn Majah dalam Kitab Iqamat as-Shalah, no. 1265, al-Fitan no. 4003.

¹⁸W.M. Watt, *Muslim Pasca Perang Teluk*, dalam *Dialog: Kritik dan Identitas agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, h. 251.

¹⁹Surah al-Baqarah: 190 menyebutkan:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, jangan melampaui batas.” Dalam surah al-Taubah: “Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, seperti mereka memerangi kamu semuanya.” Dalam suran al-Anfal: 39, “Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah.”

²⁰W.M. Watt, *Muslim Pasca Perang Teluk*, dalam *Dialog: Kritik dan Identitas agama. op. cit.*, h. 251.

²¹Harun Nasution, *op. cit.*, h. 59.

* * *